

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RAPERDA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2023

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Srir Astu Swasti Prajabyah

Salam Indonesia Raya !!!

Yth PJ Wali Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

ORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Setda Pemerintah Kota Salatiga

Para Camat, Lurah Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, puji syukur kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenannya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal-afiat. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang kami hormati, sehubungan dengan penyampaian RAPERDA Tentang Rancangan Perubahan Anggaran APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 maka kami Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

Bahwa RAPERDA Tentang Rancangan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan suatu acuan demi terwujudnya pembangunan yang mengacu kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Gerindra memberikan masukan kepada pemerintah Kota Salatiga dimana Rancangan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023 harus sesuai dengan perencanaan yang tidak pernah terpisahkan dengan rencana pembangunan daerah.

Sesuai dengan pengantar Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh saudara PJ Walikota pada tanggal 4 September 2023, yang mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Dilihat dari sisi pendapatan, Pendapatan Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp45.830.412.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) atau 5% dari anggaran penetapan sebesar Rp906.392.775.000,00 (sembilan ratus enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga pada perubahan anggaran tahun ini diproyeksikan menjadi sebesar Rp952.223.187.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Pendapatan Daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah naik 14%, Retribusi Daerah naik 26%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik 5% dan Lain-lain PAD yang Sah naik 8%. Untuk Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat naik 1% dan Transfer Antar Daerah naik 25%. Kenaikan yang paling tinggi adalah retribusi daerah yaitu 26%.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2023 naik sebesar Rp99.838.390.346,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau 10% dari anggaran penetapan sebesar Rp978.098.220.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), sehingga pada perubahan tahun ini direncanakan menjadi sebesar Rp1.077.936.610.946,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Terkait dengan belanja Daerah apabila disandingkan dengan pendapatan masih terjadi defisit yang cukup tinggi sekalipun didalam belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Memang dalam hal ini harus ada rasionalisasi terkait dengan anggaran yang diajukan oleh masing-masing OPD terkecuali apabila dalam penggunaannya untuk pemenuhan Belanja Pegawai dan kebutuhan rutin.

C. Surplus/Defisit

Apabila melihat dari sisi Pendapatan Daerah Untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp952.223.187.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Sedangkan untuk belanja dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.077.936.610.946,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) Defisit sebesar Rp125.713.423.946,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Sedangkan sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maksimal defisit sebesar 4%. Dengan tingginya angka defisit mau tidak mau ini menjadi beban daerah yang harus dipenuhi dari beban biaya maupun SILPA. Oleh karena itu yang menjadi tanggung jawab kita semua adalah bagaimana untuk bisa menaikkan pendapatan dari seluruh sektor baik PAD, Pendapatan Transfer, dan sumber pendapatan yang lain.

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari silpa yaitu sebesar Rp125.713.423.946,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). Dengan adanya silpa yang begitu besar maka Fraksi Gerindra timbul suatu pertanyaan apakah program yang perencanaannya kurang matang, apakah anggaran yang diproyeksikan terlampaui besar atau apakah tidak mengutamakan skala prioritas?
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Meliputi Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 26% ini patut kita apresiasi, namun perlu kita ingat bahwa ini harus disertai dengan data pendukung yaitu apakah potensi-potensi yang ada sudah tergarap dengan maksimal? karena kita belum pernah tahu data tentang potensi pendapatan, termasuk dari beberapa OPD belum dapat menyajikan data yang konsisten dan selalu berubah, karena masih banyak potensi yang tergarap belum maksimal. Contohnya dinas perhubungan dari 90 titik parkir baru 62 titik parkir yg sudah tergarap, artinya masih ada titik-titik potensi yang belum tergarap.
2. Untuk Pajak Daerah diantara PBB harus dilakukan validasi data tentang wajib pajak karena banyaknya pemecahan hak atas tanah dan perumahan-perumahan yang baru berdiri, untuk pajak yang bisa berpotensi menggunakan tipingbox supaya dimaksimalkan dan ada sosialisasi bahwa konsumen baik itu hotel, restoran itu berkewajiban untuk membayar pajak, dan untuk PKB pada saat ini sudah ada pembagian antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota diharapkan pajak tersebut diatas untuk bisa memberikan pendapatan yang optimal.
3. Terkait dengan OPD sumber penghasil harus bisa melakukan baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan tugas pokok fungsi yang melekat pada OPD penghasil. Karena ada beberapa OPD penghasil yang belum melakukan suatu terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan pendapatan. Diantaranya RSUD harus mengembangkan jenis pelayanan, ada unggulan produk pelayanan kesehatan sehingga menjadi magnet untuk kenaikan pendapatan. PUPR, LH bisa terkonsentrasi juga terkait dengan limbah, bagaimana limbah dari miss menjadi emas. dan OPD-OPD penghasil yang lain.
4. Untuk Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah seluruh OPD harus mempelajari indikator-indikator mana yang bisa memberikan penambahan nilai terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh daerah. Karena dengan prestasi yang diperoleh berdasarkan indikator penilaian terhadap penghasilan transfer itu sangat berpengaruh terhadap punishment dari pemerintah pusat kepada daerah. Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga akan memberikan support demi kenaikan pendapatan.
5. Belanja Operasi dalam hal ini belanja Pegawai sesuai dengan amanat undang-undang dalam berjalan waktu 5 tahun hanya dibatasi 30% dari postur APBD. Oleh karena itu diharapkan dari sekarang Belanja Pegawai harus dilakukan pencermatan diantaranya adalah TPP. Hingga saat ini kami tidak pernah mengetahui dengan pasti terkait dengan berapa besaran TPP yang harus dikeluarkan untuk tunjangan tersebut. Apabila kita melihat postur anggaran saat ini Belanja Pegawai sebesar 40% dari postur anggaran. Ini menjadi pemikiran kita bersama.

- Untuk kedepan, apabila postur anggarannya tinggi sekalipun 30% terkait dengan kesejahteraan masih tetap terjamin.
6. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar Rp. 81.028.443.247,- (Delapan Puluh Satu Milliar Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) ini perlu dikaji ulang karena untuk belanja barang dan jasa bisa direncanakan secara matang pada saat pembahasan APBD penetapan.
 7. Belanja Hibah mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 8.557.665.188,- (Delapan Milliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Hibah semestinya sudah jauh direncanakan sebelumnya karena hibah berangkat dari permohonan yang bentuknya proposal dan tidak bisa hibah dalam realisasinya dilakukan secara tiba-tiba. Oleh karena itu terkait dengan proposal permohonan mengenai waktu harus ada ketegasan dari pemerintah.
 8. Untuk Belanja Modal yang mengalami kenaikan sangat tinggi adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 50% dari anggaran penetapan yaitu sebesar Rp. 13.247.972.968,- (Tiga Belas Milliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Untuk belanja tersebut apakah sudah mempertimbangkan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan asas kemanfaatan. Karena terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran perubahan relatif pendek. yang kita khawatirkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak secara optimal.
 9. Diharapkan kepada seluruh OPD apabila itu OPD penghasil dengan adanya penambahan anggaran harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk menaikkan pendapatan. Sedangkan OPD yang mengutamakan pelayanan dengan penambahan anggaran harus semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap RAPERDA tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 11 September 2023

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|--|----|
| 1. Hj. Riawan Woro Endartiningrung, SE., MM. (Ketua) | 1. |
| 2. Agus Pramono, S.H. (Wakil) | 2. |
| 3. Sarwono, S.E. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Aslinda Afiyanti, S.P. (Anggota) | 4. |